

**Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)
di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka**

***Conflict Resolution of Agricultural Land Exemption for
Construction of West Java International Airport (BIJB)
in Kertajati District, Majalengka Regency***

**Suri Lesmanawati,¹ Syaiful Anwar,² dan Lasmono³
email: lesmanasuri@gmail.com**

Jurnal ini membahas tentang upaya resolusi konflik yang dilakukan dalam pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur yaitu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Majalengka, Menganalisis konflik yang terjadi dan berbagai faktor yang menyertainya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, serta dokumentasi. Pada proses analisis konflik dipergunakan teori SAT, konsep kerangka dinamis serta Model konsep Eskalasi Glasl. Dalam analisis resolusi konflik peneliti menggunakan Teori Galtung *Peace keeping*, *peace making* dan *peace building*, dan pendekatan *local wisdom*, kemudian juga ditambah dengan konsep keamanan nasional. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam analisis konflik ini merupakan konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat juga konflik horizontal yaitu antara masyarakat pro dan masyarakat kontra. Masyarakat kontra menolak pembebasan lahan pertanian dan pemukiman dikarenakan lahan pertaniannya adalah lahan subur yang merupakan mata pencaharian sebagian besar warga desa Sukamulya Kertajati dan tidak bersedia menerima uang ganti rugi dari pemerintah yang tidak sesuai. Eskalasi tertinggi dalam konflik terjadinya bentrokan yang melibatkan masyarakat dan pihak keamanan pada saat pengukuran lahan masyarakat pro dan dilakukan oleh pinak BPN yang menyertakan ribuan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan. Upaya resolusi konflik dilakukan dengan upaya mediasi dan cipta kondisi damai yang dilakukan secara persuasive oleh pemerintah dan aparat keamanan khususnya kodim. Selain itu upaya pendekatan *local wisdom* pun dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan melakukan berbagai acara kebudayaan yang dapat tercipta kebersamaan didalam lingkungan desa Sukamulya, sehingga beberapa upaya yang dilakukan ini dapat berdampak kepada terciptanya keamanan dan perdamaian.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi Konflik , Cipta kondisi damai , dan Pembebasan lahan

This journal discusses conflict resolution efforts carried out in agricultural land acquisition for infrastructure development, namely West Java International Airport (BIJB) in Kertajati Majalengka District, Analyzing the conflicts that occur and the various factors that accompany them. This research was conducted using qualitative methods, data collection was carried out through interviews, observation, library research, and documentation. In the process of conflict analysis, the SAT theory is used, the concept of dynamic framework and the concept of the Escalation Glasl concept. In conflict resolution analysis, researchers used the Theory of Galtung Peace keeping, peace making and peace building, and the local wisdom approach, then also added the concept of national

¹ Mahasiswa Pascasarjana Prodi Damai dan resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

² Dosen Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

³ Wakil rektor II Universitas Pertahanan

security. The results of the study indicate that in the analysis of this conflict is a vertical conflict that occurs between the government and the community as well as horizontal conflict between the pro community and the counter community. Counter-citizens refused to release agricultural land and settlements because the agricultural land was fertile land which was the livelihood of most of the residents of Sukamulya Kertajati village and were unwilling to accept compensation from the government that was not appropriate. The highest escalation in the conflict was a clash involving the community and security forces at the time of the pro-community land measurement and carried out by the BPN pinak which included thousands of security forces to conduct security. Efforts to resolve conflict are carried out through mediation and the creation of peaceful conditions that are carried out persuasively by the government and security forces, especially the Kodim. In addition, the local wisdom approach was carried out by the local village government by conducting various cultural events that could be created together in the Sukamulya village environment, so that some of the efforts made could have an impact on creating security and peace.

Keywords: Conflict , Conflict Resolution, Create Condition of peace and land acquisition

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan suatu tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV.⁴ Pada saat ini Indonesia merupakan negara berkembang yang memang dalam hal ini sedang melakukan pembangunan dari berbagai sektor, baik dalam bidang kelautan atau kemaritiman, bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya,

sumber daya dan lingkungan hidup, maupun dalam bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini salah satunya adalah yang akan menunjang transportasi penerbangan, baik penerbangan domestik maupun penerbangan Internasional.

Pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai roda penggerak laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting di dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Stiglitz tujuan utama dalam pembangunan adalah adanya transformasi masyarakat dengan tujuan yang terukur. Masih menurut Stiglitz, Strategi pembangunan memiliki fungsi sebagai penentu prioritas

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke 4 berbunyi: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

dan adanya kesadaran akan pentahapan, melakukan koordinasi baik antar pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, maupun antar swasta.⁵

Salah satu pembangunan Infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pembangunan bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Kecamatan Kertajati itu berada pada batas-batas wilayah sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Kecamatan Kadipaten kemudian pada sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Sedangkan pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jatitujuh, dan di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Dawuan. Untuk Kecamatan

⁵ Joseph E. Stiglitz, seorang pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, adalah Profesor Universitas di Universitas Columbia dan Kepala Ekonom di Institut Roosevelt, lahir 9 Februari 1943 adalah seorang pakar ekonomi, pengarang, dan peraih penghargaan Nobel bidang Ekonomi (2001) Stiglitz saat ini mengajar di Graduate School of Business di Columbia University dan menjadi editor jurnal *The Economists*, *Voice* bersama Bradford DeLong dan Aaron Edlin. Ia juga menjadi anggota Dewan Penasihat untuk Oxford Council on Good Governance. Selain memberikan banyak kontribusi di bidang ekonomi mikro, Stiglitz juga beberapa kali memegang jabatan yang bersifat membuat kebijakan. Ia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden AS pada masa pemerintahan Bill Clinton (1995 - 1997). Di bank dunia, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Senior dan Ekonom Kepala (1997 - 2000)

Kertajati sendiri memiliki luas 138,36 KM² yang mana terdiri dari 14 Desa Swadaya mula dan terdiri dari 71 rukun warga dan 182 rukun tetangga, juga rasio RT terhadap RW adalah 3. Jumlah desa⁶ tersebut bertambah menjadi 14 desa pada tahun 2011 dengan adanya Desa Sahbandar sebagai pemekaran Desa Mekarjaya.⁷

Dari desa-desa tersebut Desa Sukamulya merupakan desa yang hampir seluruhnya terdampak pembangunan BIJB Kertajati. Selain Lahan pertanian di Kecamatan Kertajati ini banyak juga pemukiman warga di desa-desa yang terdampak pembangunan BIJB Kertajati. Penduduk yang datang kedesa lain maupun yang pindah kebeberapa desa lainnya, menjadi lebih signifikan, dikarenakan adanya pembangunan BIJB Kertajati, bukan hanya pembangunan BIJB Kertajati namun juga dikarenakan adanya pembangunan jalan tol.⁸ Pembangunan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka ini telah berdampak pada terkena gusurnya 7 desa yang ada yaitu Desa Kertajati, Desa

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Buku Kabupaten Majalengka dalam Angka 2018*, Majalengka Regency in Figures 2018 hlm 9

⁷ *Ibid* hlm 2

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Kabupaten Majalengka dalam Angka 2018*, Majalengka Regency in Figures 2018 hlm 9

Kertasari, Desa Sukamulya, Desa Bantarjati, Desa Sukakarta, Desa Mekarmulya dan Desa Babakan. Pembangunan bandara BIJB Kertajati di bangun di daerah persawahan dan pedesaan seluas 5000 Hektare, dengan kebutuhan yang diperlukan untuk bandara BIJB Kertajati itu sendiri yaitu seluas 1800 Hektare, dan sekitar 3200 Hektare akan dibangun untuk kebutuhan pendukung operasional bandara yaitu aerocity.

Pusat bisnis aerocity ini diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap perekonomian yang akan mendukung aktifitas bandara. Arah pemanfaatan ruang untuk pusat bisnis Aerocity pada wilayah Bandara BIJB Kertajati akan mengembangkan kawasan bandara dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat, mengembangkan bandara, kemudian mengintegrasikan dengan adanya pengembangan wilayah disekitarnya dan juga agar dapat bekerja sama dengan pihak swasta.⁹

⁹ Data pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2012-2016, Pemerintah kabupaten Majalengka melalui website http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id/images/datapembangunan/DATA%20PEMBANGUNAN%202012-2016_2.pdf

Pembangunan bandara BIJB Kertajati ini sendiri sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Studi kelayakan bandara BIJB Kertajati ini sebenarnya sudah ada sejak 2003, Izin penetapan lokasi pun dilakukan sejak tahun 2005. Kemudian terbit Peraturan menteri yang mengatur tentang pembangunan bandara BIJB Kertajati adalah tercantum pada Peraturan Menteri (Permen). Perhubungan No KM 5 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar udara di Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat.

Secara umum pembangunan bandara BIJB Kertajati di wilayah kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ini merupakan suatu proyek pembangunan yang dapat memberikan keuntungan lebih terhadap Provinsi Jawa Barat. Namun di sisi lain yang terjadi dari pembangunan tersebut adalah memberikan dampak terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif khususnya di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Pembangunan bandara ini akan memanfaatkan lahan yang memiliki kurang lebih sekitar 1.800 Hektare, dan

3200 Hektare untuk pengembangan pusat bisnis Aerocity sebagai sarana pendukung pembangunan bandara BIJB Kertajati. Lahan ini merupakan lahan pertanian dan juga pemukiman penduduk, Lahan pertanian merupakan lahan yang memang digunakan warga masyarakat sebagai sumber penghidupan mata pencaharian sebagian besar warga masyarakat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Adapun penetapan lokasi dari pembangunan bandara BIJB Kertajati ini tampaknya menimbulkan permasalahan sendiri karena adanya pembebasan lahan yang dialami warga masyarakat yang mata pencahariannya bersumber dari lahan pertanian tersebut.

Pembangunan bandara ini akan menjadi terhambat jika dalam pelaksanaannya tersebut terjadi hambatan dan kendala di lokasi pembangunan, seperti adanya kendala dalam pembebasan lahan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik, konflik yang ada seharusnya diselesaikan secara cepat dan tepat agar pembangunan bandara BIJB Kertajati ini benar-benar terlaksana sesuai dengan rencana yang telah di buat. Namun tentunya yang diharapkan ini jangan sampai ada

masyarakat yang dirugikan dengan adanya pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Pada tanggal 17 Nopember 2016 terjadi puncaknya eskalasi konflik dalam pembebasan lahan untuk kepentingan bandara BIJB Kertajati, yaitu bentrokan yang terjadi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam upaya pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka untuk langkah awal dalam pembebasan lahan tersebut. namun hingga kini kondisinya sudah lebih kondusif dan terjaga keamanannya. Namun segala hal tetap harus diwaspadai dan sama-sama saling dapat menjaga komunikasi dan tetap mendengarkan keluhan yang disampaikan warga masyarakat yang khususnya terdampak akan pembangunan bandara BIJB Kertajati ini.

Masyarakat yang lahannya terkena dampak dari pembangunan bandara BIJB Kertajati ini umumnya memilih untuk pindah ke beberapa desa tetangga yang memang tidak terdampak pembangunan bandara maupun Aerocity.

Lahan pertanian yang peruntukannya berubah seiring dengan

dibangunnya Bandara BIJB Kertajati, karena ada kebijakan pemerintah tersebut, menjadikan alih fungsi lahan pertanian akan berdampak kepada kondisi sosial ekonomi yang ada. Hal ini pun jelas akan mempengaruhi dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu akan berkurangnya produksi pangan yang akan menyebabkan ketahanan pangan yang terancam.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti merasa penting untuk menganalisis konflik dan upaya resolusi yang dilakukan pasca konflik bentrokan tanggal 17 Nopember 2016, yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat dalam peristiwa pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN. Peneliti merasa penting untuk menganalisis resolusi konflik dan bagaimana dapat dilakukan Sehingga pembangunan bandara tetap dapat berjalan dan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2018. Dikarenakan pula konflik pembebasan lahan untuk pembangunan infrastuktur demi kepentingan umum ini sering sekali terjadi di Indonesia.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :1) Menganalisis

konflik dalam pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan Bandara BIJB, 2). Menganalisis resolusi konflik pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan Bandara BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka. diharapkan dengan ini maka upaya-upaya yang dilakukan menjadi bahan pengetahuan terhadap berbagai daerah yang mana di Indonesia ini konflik tentang pembebasan lahan untuk pembangunan infrastuktur sering sekali terjadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan dalam tesis ini peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam melakukan penelitian ini. Creswell (1998:15) menekankan suatu gambaran yang kompleks dan holistik, suatu rujukan pada naratif yang kompleks dan mengajak pembaca ke dalam dimensi jamak dari sebuah masalah atau isu yang menyajikannya dalam semua kompleksitasnya.¹⁰ Sementara itu menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle (2006). Penelitian kualitatif juga di sebut sebagai penelitian interpretif atau

¹⁰ Prof.Dr.Emzir,M.Pd *Metodologi penelitian kualitatif Analisis data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010. Hlm 2

penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang di pinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan di adaptasi kedalam setting pendidikan. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan tehnik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian kualitatif, Dalam hal ini tehnik pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi awal, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Dalam tehnik Analisis data menurut Miles M.B dan Huberman AM terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah *data collection* pengumpulan data atau *data collection* dari hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang didapat berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan oleh penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. kemudian yang kedua adalah kondensasi data yaitu pemilihan atau seleksi fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. tahap selanjutnya yaitu penyajian data

atau *data display*, penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan. dan tahap yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan atau *Conclusions drawing* atau *verofiyng* merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan terakhir akan terjadi jika pengumpulan data telah selesai, tergantung kepada ukuran dan catatan dilapangan, penyimpanan serta perbaikan-perbaikan yang akan digunakan pada kesimpulan akhir ini diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara.

Kerangka Konseptual

Teori digunakan sebagai perspektif yang memberikan batasan dalam pemikiran peneliti, sehingga dalam proses analisis tidak akan terjadi pembiasan dengan prespektif teori lainnya. Teori dan konsep merupakan instrumen yang penting dalam penelitian ilmiah. Peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep dalam menganalisis konflik yang terjadi yaitu dengan teori SAT, Konsep kerangka dinamis dan model konsep eskalasi Glasl sedangkan dalam menganalisis resolusi konfliknya

peneliti menggunakan Teori Galtung *Peace keeping, Peace making* dan *Peace building*, serta pendekatan *Local wisdom* selain teori konflik dan resolusi konflik adapula penjelasan tentang Konsep keamanan nasional yang menjadikan hal ini terganggu jika terjadi konflik .

Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *Confligere* yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, *Conflict* yang kemudian di adopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik.¹¹ Arti Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perpecahan, perselisihan, pertentangan.¹² Selanjutnya menurut Garna, Perspektif konflik merupakan suatu aspek penting dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yaitu membahas tentang dominasi suatu kelompok individu lainnya. Konflik juga didefinisikan secara sederhana oleh Fink (1968) dalam Folger dan poole. Sebagai *disagreement* atau ketidaksepahaman, *Competition* (Kompetisi), atau sebagai adanya

¹¹ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Hunamika, 2009 hlm 4

¹² Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/konflik>

kepentingan-kepentingan yang bertentangan atau inkompatibel (*the Presence of incompatible interest*) konflik terjadi pada situasi kompetisi terbuka ketika setiap pihak mencoba untuk mengalahkan musuhnya.¹³

Teori SAT

Teori konflik SAT digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis konflik yang terjadi, untuk mengetahui sejauh mana akar permasalahan yang ada. Analisis konflik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teori SAT (*Structural, Akselerator* dan *Trigger*) dari Ichsan Malik.¹⁴ Model Teori SAT ini digunakan untuk melihat adanya masalah dasar pada konflik yang terjadi, S di sini sebagai *Structural* merupakan hal yang sangat dan paling mendasar

¹³ Folger, J.P., dan Poole, M.S (1984). *Working Through Conflict*. USA: Scoot, Foresman Company

¹⁴ Ichsan Malik adalah Ketua IM Center untuk dialog dan perdamaian, working group resolusi konflik dari Ikatan Psikologi Sosial seluruh Indonesia, dan anggota Tim Kerja Dialog dan Mediasi GPPAC mewakili jaringan Asia Tenggara, Beliau adalah Inisiator dan Fasilitator dari Gerakan Perdamaian Maluku Baku Bae, sebuah gerakan yang berlangsung sejak April 2000 hingga 2003 untuk membangun perdamaian di Maluku. Beliau menjadi dosen tetap di Departemen Psikologi UI sejak tahun 2000 dan mengajar mata kuliah Resolusi konflik dan Konflik Intervensi di Universitas Pertahanan sejak 2012 hingga kini, Ichsan Malik menerima penghargaan Sani Ahu Siwalima dari pemerintah dan para Pemimpin adat Maluku pada tahun 2011.

yaitu meliputi masalah ketimpangan baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya, kemudian A sebagai Akselerator merupakan segala hal yang meningkatkan atau mempercepat proses terjadinya konflik yang semula kecil menjadi besar, sedangkan T untuk *Trigger* adalah pemicu yang mana hal ini merupakan kejadian biasa yang dapat menjadi alasan terjadinya suatu konflik menjadi besar.

Konsep Kerangka Dinamis

Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik merupakan modifikasi dari Titian Damai Framework yang dibuat pada dalam rangka deteksi dini dan respons dini yang di konstruksi oleh Ichsan Malik dan tim Institut titian perdamaian pada tahun 2010. Awalnya hanya memiliki tiga komponen yaitu eskalasi de-eskalasi, komponen faktor konflik dan komponen aktor konflik. Kemudian pada tahun 2013 terdapat dua komponen tambahannya yaitu komponen pemangku kepentingan dan komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.¹⁵ Komponen

pertama yaitu eskalasi dan de-eskalasi, tingkat eskalasi memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian. Eskalasi harus dapat dideteksi dan dikendalikan, dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan konflik agar krisis mulai teratasi, maka kondisi ini disebut terjadinya de-eskalasi. Komponen kedua yaitu faktor konflik, tiga elemen dalam faktor konflik ini yaitu: Elemen pemicu konflik, Elemen akselerator dan Elemen akar konflik.

Komponen ketiga adalah aktor konflik yaitu yang terdiri dari kategori provokator konflik, kelompok rentan dan kelompok fungsional yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Komponen keempat yaitu pemangku kepentingan atau stake holder, adalah elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik, komponen ini terdiri dari kelompok polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok LSM, peneliti serta media massa. Komponen yang kelima adalah kemauan politik penguasa dapat terdeteksi dalam dua hal yaitu inisiatif dan kepemimpinan para penguasa untuk

¹⁵ Ichsan Malik, *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017

menyelesaikan konflik yang terjadi secara tuntas, dan adanya produk-produk hukum atau kebijakan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik.¹⁶

Model konsep eskalasi Glasl

Frederich Glasl (1997) mengembangkan *Conflict Escalation* Model bagi fasilitator konflik untuk dapat memahami tahapan dari eskalasi konflik. Eskalasi dipahami sebagai meningkatnya tensi dalam konflik. Dalam model tersebut, Glasl membagi tahapan konflik menjadi Sembilan, yaitu: 1) *Hardening*, kondisi pertentangan yang masih memungkinkan adanya kerjasama meskipun unsur persaingan masih dapat dikendalikan, 2) *Debates* atau *Polemics*, kondisi dimana sama-sama pihak ingin mendominasi posisi satu sama lain mulai timbul kecurigaan terhadap perilaku pihak lain, 3) *Action* atau tindakan, ketika bicara sudah tidak lagi membuahkan hasil dan salah satu pihak merasa bahwa berbicara mulai tidak berguna, kerjasama hampir tidak mungkin, 4) *Images* atau gambaran dan koalisi, masing-masing memposisikan lawan dalam peran negatif,

menghadapkan lawan dengan data-data, strategi koalisi mulai dilakukan oleh pihak yang berseteru, 5) *Lose of Face* atau kehilangan muka, Serangan terbuka dan dilakukan secara langsung mengenai integritas moral lawan yang bertujuan untuk membuat mereka kehilangan muka, tahapan eskalasi utama, lawan harus dipermalukan, saling menyerang diranah publik. Tindakan yang menyebabkan rasa malu dimuka umum untuk satu maupun kedua belah pihak. 6) *Strategy of threat/* ancaman sebagai strategi, Penggunaan ketakutan sebagai bentuk strategi mengalahkan pihak lawan, dalam level ini ancaman mengancam dan peluncuran ultimatum terakselerasi dan jamak sekali ditemui. Ancaman serangan balik, aksi yang dilakukan hanya sebuah reaksi, ada keinginan untuk mengontrol timbul kemarahan. 7) *Limited distruction* atau kerusakan terbatas Penyerangan, lawan tidak lagi dilihat sebagai manusia, mulai ada proses dehumanisasi, values mulai bergeser, situasi penggambaran kekecauan dimana sinisme mulai melewati moralitas yang seharusnya dipegang para aktor sesuai dengan identitas masing masing, saling mengesampingkan nilai-nilai perdamaian

¹⁶ *ibid*

sesama manusia. 8) Fragmentasi musuh Tindakan untuk menghancurkan lawan, ketertarikan penghancuran secara besar-besaran terhadap lawan, terjadi kehancuran total baik secara fisik, mental spiritual dari salah satu atau semua pihak yang bermusuhan, serangan yang langsung ditujukan pada inti kelompok lawan, dimaksudkan untuk menghancurkan musuh atau menghancurkan sistem vitalnya. 9) *Together into the abbyss* Konfrontasi total tanpa ada kemungkinan untuk mundur kembali, menerima kehancuran diri asal lawan hancur, faktor kelangsungan hidup diri sendiri dan pihak sendiri mulai tidak lagi dipertimbangkan. Dalam situasi ini, eksistensi dan kemanusiaan menjadi pembahasan yang krusial.

Resolusi konflik

Resolusi konflik, adalah suatu istilah komprehensif yang mengimplementasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan, bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konfliknya

telah di ubah.¹⁷ Resolusi konflik menurut Jeong (2010) adalah bahwa konflik yang ada bisa bertransformasi, untuk itu diperlukan cara pengelolaan konflik dan resolusi yang menyentuh akar permasalahan agar tidak menciptakan konflik yang berkepanjangan. Jeong juga menyatakan transformasi konflik akan terjadi jika konflik tersebut disebabkan oleh masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi, sehingga dalam proses resolusi konflik harus langsung bersentuhan pada akar permasalahan sehingga konflik tidak akan terulang lagi.¹⁸

Teori Galtung *Peace keeping*, *Peace making* dan *Peace building*

Teori Galtung, yang terdiri dari tiga tahap yaitu, *Peace keeping*, *Peace making* dan *Peace building*. Tiga model resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung sebagaimana dikutip dalam Alo Liliweri 2005, menyatakan bahwa pada akhirnya penyelesaian konflik harus

¹⁷ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham Tom woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002

¹⁸ Sri Wahyuni, Strategi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground pada zona ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh republic Rakyat Tiongkok, Tesis. Universitas Pertahanan, Bogor 2018

melibatkan seperangkat perubahan dinamis yang melibatkan penurunan perilaku konflik, Perubahan sikap, dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan dan berada dalam inti struktur konflik. Menurut Galtung, resolusi konflik pada hakikatnya merupakan serangkaian aktifitas yang berbentuk siklus, berawal dari *Conflict Prevention* yaitu aktivitas pencegahan konflik, *Peace keeping* yaitu intervensi untuk menghentikan konflik kekerasan, dan *Peace making* yaitu negosiasi untuk menciptakan perdamaian dan *Peace building* yaitu upaya untuk membina perdamaian agar bisa bertahan dalam jangka panjang.

Di dalam upaya resolusi konflik terdapat negosiasi dan mediasi, Negosiasi yaitu proses dimana pihak-pihak dalam konflik berusaha untuk menyelesaikan konflik mereka. Mediasi melibatkan campur tangan pihak ketiga, yang merupakan proses sukarela dimana pihak-pihak yang mempertahankan kontrol atas hasil (mediasi murni), meskipun juga kadang-kadang dapat dikombinasikan dengan bujukan positif dan negatif (mediasi dengan otot). Konsiliasi atau fasilitasi dekat dalam arti mediasi murni, dan mengacu pada upaya

perantara untuk mendorong para pihak untuk bergerak menuju negosiasi.

Pendekatan *Local wisdom*

Situmorang dan Simanjuntak, 2015 menyatakan bahwa kearifan lokal tidak sama pada tempat, waktu dan suku bangsa. perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan alam dan sosialnya.¹⁹ Geertz (1983) menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia di dalam komunitasnya. Hal itu yang berarti bahwa kearifan lokal berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.²⁰ *Local Wisdom* atau kearifan lokal ini merupakan sebuah tawaran strategi dalam proses penanganan konflik dengan fokus kajian pada realitas wilayah konflik terjadi. Kearifan lokal menjelaskan mengenai nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat secara sukarela.

¹⁹ Bambang Wahyudi, *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*, Yogyakarta. September 2018

²⁰ *ibid*

Konsep Keamanan Nasional

Keamanan Nasional dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi, sebagai fungsi keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas yang didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia di samping kesejahteraan. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia, karena konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), Keamanan dalam negeri (*Internal security*) Keamanan public (*Public security*) dan Keamanan insani (*Human security*).

Dimensi dari keamanan nasional adalah militer dan non militer, Termasuk non militer adalah dan terutama; Keamanan ekonomi (*Economic security*), Keamanan energi (*Energy security*), Keamanan lingkungan (*environment Security*) dan Keamanan manusia (*Human security*) Keamanan nasional mencakup pencegah-tangkal ancaman dari

(actor) negara maupun (actor) non negara dan ancaman bencana alam yang dapat menghancurkan suatu negara. Istilah keamanan mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sesuatu, misalnya keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya.

Menurut Barry Buzzan bahwa studi keamanan merupakan cabang dari politik. Dasar masalah yang mendasari hampir semua minat dalam hubungan internasional adalah ketidakamanan. Pengaruh serta status kekuasaan dan kedamaian yang diperoleh sebagai konsep inti berasal dari wawasan, dan panduan untuk tindakan yang mereka tawarkan. Perkembangan keamanan tradisional dilakukan oleh Barry Buzzan yang mengategorikan lingkup isu keamanan kedalam 5 sektor yaitu : Sektor militer, Sektor politik, Sektor ekonomi, Sektor sosial dan Sektor lingkungan. Konsep dan sistem keamanan nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa

maupun sebagai sumber segala sumber hukum nasional, dan amanat keamanan yang tertuang di dalam UUD RI Tahun 1945, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan jaman.

Keamanan nasional akan terbentuk jika sistem pertahanan suatu negara berkembang dan berkemajuan baik dalam teknologi maupun perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan suatu negara. Pembangunan sarana dan prasarana akan terhambat jika didalamnya terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, karena semua itu akan berdampak kepada terpenuhinya kemampuan negara dalam memfasilitasi atau mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung demi terciptanya pertahanan negara.

Hasil dan Pembahasan

Bentrokan yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 di desa Sukamulya memberikan dampak yang tidak baik terhadap kondisi masyarakat dan hubungan dengan aparat keamanan yang mengamankan lokasi kejadian pada

saat pengukuran berlangsung. Dalam Pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak BPN melibatkan kurang lebih 2000 personel yang berasal dari Polda Jawa Barat, Polres Majalengka, TNI dan Satpol PP, banyaknya personel dimaksudkan untuk mengamankan pelaksanaan pengukuran tersebut sehubungan dengan masih adanya penolakan dari sejumlah warga di Desa Sukamulya yang sudah berlangsung sejak lama, yang menurut sebagian warga pembangunan Bandara BIJB Kertajati tersebut merugikan warga soal ganti rugi lahan pertanian yang selama ini digunakan sebagai mata pencaharian warga yang merupakan lahan subur dan juga soal penggantian harga rumah yang tidak sesuai, dan tidak ada komunikasi atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Kertajati Desa Sukamulya umumnya bertani, mereka menggarap lahan milik sendiri maupun menggarap lahan milik orang lain yang upahnya sudah disepakati bersama. Hal inilah yang masih menjadi dasar penolakan atas pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lahan pertanian maupun pemukimannya,

dikarenakan bahwa lahan pertanian yang digunakan adalah lahan subur yang menjadi mata pencaharian warga masyarakat desa Sukamulya, Selain juga harga yang tidak sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah.

Konflik dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati ini bermula ketika pada tahun 2004, dimana pada waktu itu secara sepihak dari adanya penandatanganan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 11 pak kuwu pada tanggal 14 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa seluruh warga masyarakat Kecamatan Kertajati mendukung sepenuhnya atas rencana pembangunan Bandara BIJB.²¹ Namun Pada kenyataannya dilapangan hanya terdapat 300 Kepala Keluarga yang mendukung pembangunan Bandara BIJB Kertajati dan sementara selebihnya menolak.²²

Setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani kemudian dilakukanlah analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dalam hasil analisis yang

dilakukan tersebut dinyatakan bahwa lahan yang berada di Desa Sukamulya adalah lahan tandus. dengan gabah kering giling sebanyak 6 kwintal/hektare, Padahal data dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka pada tahun 2005 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka adalah sebanyak 52,35 Kwintal perhektare.²³

Dalam Pembangunan Bandara BIJB Kertajati terjadi dua kelompok masyarakat , yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Masyarakat yang pro adalah masyarakat yang menyetujui dengan di bebaskannya lahan mereka, sedangkan kelompok masyarakat yang kontra yaitu masyarakat yang menolak lahannya di bebaskan untuk pembangunan di karenakan lahan pemukiman dan lahan pertanian yang subur serta harga yang diberikan pemerintah tidak sesuai.

Dalam konflik yang terjadi hingga tahun 2016 yaitu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tidak adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, adanya ketidaksesuaian kondisi lahan pertanian yang dilaporkan dan kondisi yang sebenarnya dilapangan,

²¹ Pak kuwu adalah sebutan untuk bapak yang menjabat sebagai Kepala Desa di sebagian wilayah Jawa Barat termasuk wilayah Kabupaten Majalengka

²² Sumber didapat melalui Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang di unggah melalui situs <http://www.kpa.or.id/news/blog/warga-sukamulya-menolak-pembangunan-bjib/>

²³ Lembaga Bantuan Hukum, Catatan Akhir tahun 2016 provinsi Jawa Barat

dan juga adanya ketidak sesuaian harga yang diberikan oleh pemerintah, kemudian di rasa oleh masyarakat bahwa harga yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan harga beli lahan kembali di wilayah sekitarnya sehingga apabila dibebaskan oleh pemerintah maka mereka tidak mendapatkan kembali lahan yang luasnya sama dengan yang mereka miliki sebelumnya, dan uang penggantian yang di berikan pemerintah tidak cukup untuk digunakan membangun rumah dengan luas yang sama seperti sebelum adanya penggusuran lahan dan pemukiman.

Faktor Konflik

Puncak konflik pada tanggal 17 Nopember 2016 yang terjadi di Desa Sukamulya yaitu adanya pengukuran yang dilaksanakan oleh pihak BPN menyertakan ribuan aparat keamanan yang disiagakan dilokasi pengukuran yaitu di Desa Sukamulya. Dari faktor *structural* dalam konflik yang terjadi tahun 2016 yaitu bahwa tidak adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, adanya ketidaksesuaian kondisi lahan pertanian yang dilaporkan dan kondisi yang sebenarnya dilapangan,

dengan adanya keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang memiliki lahan pertanian, Kemudian hal lain yang terjadi yaitu adanya intimidasi dan tindakan dilakukan oleh warga yang kontra kepada warga yang pro.

Kesalahan dalam penghitungan luas lahan masih terjadi, sehingga mereka harus mengajukan keberatan terhadap luas lahan yang tidak sesuai, yang dalam hal ini akan kembali mengulur waktu untuk bisa segera pindah dari lokasi yang terdampak bandara. Warga masyarakat enggan untuk pindah dari desa, dikarenakan mereka merasa bahwa ini tanah leluhur yang harus dijaga kelestariannya dan ada faktor sejarah didalamnya, karena desa dibangun oleh para pendahulu mereka dengan darah dan air mata sehingga keinginan untuk tetap mempertahankan desa sangat kuat.

Di sisi lain bagi warga yang kontra harga yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan harga beli lahan kembali di wilayah sekitarnya sehingga apabila dibebaskan oleh pemerintah maka mereka tidak mendapatkan kembali lahan yang luasnya sama dengan yang mereka miliki sebelumnya, dan uang penggantian yang di berikan

pemerintah tidak cukup untuk digunakan membangun rumah dengan luas yang sama seperti sebelum adanya penggusuran lahan dan pemukiman.

Selain faktor *structural* tersebut Ada indikasi bahwa faktor *Trigger* atau pemicu bentrokan yang terjadi di Desa Sukamulya juga karena pada saat itu massa di susupi oleh berbagai pihak yang menambah suasana tidak kondusif yaitu warga dari perbatasan daerah tersebut yaitu dayak indramayu. Dayak Indramayu yang merupakan warga di luar dari Desa Sukamulya yang ikut bergabung kedalam kelompok massa. Belakangan diketahui bahwa kelompok-kelompok massa tersebut yang menghadang aparat untuk melakukan pengukuran bukan merupakan warga pemilik lahan yang akan diukur oleh pihak BPN.

Selain kedua faktor tersebut ada faktor lain yaitu *akselerator* atau faktor pendorong yang membuat timbulnya konflik semakin besar. Adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan lahan masyarakat pro dan sudah di ukur serta telah dilengkapi pemberkasannya, namun pembayaran belum juga teralisasi. Karena

kekecewaan terhadap pemerintah ini maka warga yang pro mulai mendukung masyarakat yang kontra untuk tetap mempertahankan lahannya. Kemudian selain itu juga adanya banyaknya rumah hantu yang didirikan warga dengan maksud-maksud tertentu, Rumah hantu adalah rumah semi permanen yang dibangun dengan papan dan setengah tembok yang didirikan diatas lahan milik warga dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan pembayaran ganti rugi yang lebih besar dari pemerintah.

Dalam konflik yang terjadi tidak terlepas dari aktor konflik, Aktor konflik adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Aktor konflik dalam kerangka dinamis Ichsan Malik terbagi menjadi dua, yaitu provokator dan kelompok rentan. provokator adalah aktor utama yang terlibat di dalam konflik, sedangkan kelompok rentan adalah kelompok yang mudah terprovokasi.

Terkait pembangunan bandara BIJB Kertajati ini aktor konflik utama yang sesungguhnya adalah antara pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan pengambil keputusan dan masyarakat pemilik lahan pertanian yang

mana lahan ini yang akan digunakan dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati. Konflik ini merupakan konflik vertikal karena melibatkan pemerintah dan masyarakat. Aktor konflik dari pemerintah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang dalam melaksanakan pembangunan sesuai instruksi yang diberikan, kemudian ada pula pihak BPN yaitu pihak yang melaksanakan pengukuran dan bekerja sama dengan tim *appraisal*.

Adapun Kelompok rentan yang mudah terprovokasi dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang sudah pro namun belum mendapatkan pembayaran ganti kerugian dari pemerintah sedangkan lahannya sudah di ukur dan pemberkasan sudah dilakukan, dalam kurun waktu menunggu tersebutlah masyarakat yang pro ini mudah terprovokasi dan mampu menjadikan konflik meluas dikarenakan ada kekecewaan yang dirasa kepada pemerintah yang belum merealisasikan pembayarannya. Aktor konflik lain selain pemerintah dan masyarakat adalah aparat keamanan yang terlibat dalam bentrokan 17 Nopember 2016 pada saat pengukuran berlangsung. Aparat keamanan dalam hal ini bertugas dalam

mengamankan asset negara sesuai dengan SOP yang dilaksanakan.

Selain actor konflik yang ada Tahap selanjutnya dalam analisis konflik yaitu melihat sejauh mana eskalasi dan deeskalasi menurut teori Glasl. Dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati jika dilihat dari tahapan teori Glasl yang ada maka konflik lahan yang terjadi berada pada tahap 5 yaitu *Lose of face*, yaitu serangan terbuka dan dilakukan secara langsung mengenai integritas moral lawan yang bertujuan untuk membuat mereka kehilangan muka, tahapan eskalasi utama, lawan harus dipermalukan, saling menyerang diranah publik.

Tindakan yang menyebabkan rasa malu dimuka umum untuk satu maupun kedua belah pihak ini telah terjadi pada konflik pembangunan bandara BIJB yang mana hal ini sudah terjadi yaitu dengan adanya serangan terbuka yang dilakukan di tengah lahan pertanian dan saling berhadap-hadapan dan masing-masing menggunakan senjata yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Kondisi masyarakat pasca konflik yang terjadi dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati sampai saat ini memang sudah kondusif dan

pembangunan tetap berjalan seiring dengan peresmian telah dilaksanakan dan sudah beroperasinya bandara dengan beberapa penerbangan yang dilakukan setiap harinya. Namun dengan demikian, kondisi di lingkungan desa Sukamulya masih ada masyarakat yang tetap mempertahankan lahan pertanian dan pemukimannya walaupun jumlah yang ada sudah minoritas namun hal ini tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah desa setempat untuk tetap menghargai keputusannya terhadap lahan milik warga tersebut.

Resolusi Konflik

Setelah konflik yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 maka ada upaya yang dilakukan oleh beberapa *stake holder* untuk dapat mengatasi kondisi yang kondusif, Upaya-upaya resolusi konflik yang salah satunya adalah melalui upaya pendekatan yang dilakukan Kodim setempat dalam melakukan atau mendengarkan keluhan-keluhan warga desa sukamulya terhadap kondisi saat ini. Kebijakan Kodim dalam upaya meredam konflik yaitu dengan adanya pendekatan secara persuasif yang dilakukan, hal ini sangat berpengaruh baik kepada kondisi

masyarakat pasca konflik bentrokan terjadi dan warga masyarakat merasa diperhatikan dengan kondisi yang ada. Sedikit demi sedikit apa yang menjadi keluhan warga dapat terealisasi.

Stake holder adalah elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik. Elemen ini terdiri dari kelompok polisi, militer, tomas, toga, kelompok LSM, Media Massa dan kelompok peneliti.

Aparat keamanan mempunyai Peranan penting dalam resolusi konflik pembangunan BIJB Kertajati agar konflik tidak semakin melebar, Dalam kerangka dinamis Icsan Malik. peran tokoh masyarakat dan tokoh agama ini memiliki kapasitas besar dalam meredam konflik yang terjadi, diibaratkan sebagai pemadam kebakaran di kalangan masyarakat yang terlibat konflik, baik masyarakat yang pro maupun yang kontra. Peran tokoh agama dalam setiap kesempatan kegiatan keagamaan berupaya untuk memberi masukan kepada masyarakat agar tetap berserah diri dan bersabar dalam menghadapi kondisi yang ada di lingkungan dalam proses pembangunan bandara.

Upaya mediasi pasca konflik bentrokan tanggal 17 Nopember 2016 tersebut telah diupayakan untuk dilakukan yaitu pada tanggal 19 Nopember 2016, Mediasi yang dilakukan setelah kejadian ini yang melibatkan Staf kepresidenan, Hal ini dilakukan mengingat ada kedekatan secara emosional dengan warga Desa Sukamulya dan juga dikarenakan ada bantuan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang menjembatani pertemuan tersebut.

Mediasi yang dilakukan tersebut mampu meredam kondisi yang ada. Hasil dari mediasi yaitu dengan ditarik mundurnya aparat keamanan yang masih berjaga di lokasi kejadian, karena dengan adanya aparat keamanan yang masih bersiaga memberikan kesan menakutkan dan suasana mencekam bagi warga masyarakat. Selain itu cipta kondisi yang dilakukan Kodim di nilai sangat berhasil melalui pendekatan secara persuasif dalam mendengar keluhan dan keinginan warga menjadikan upaya penanganan konflik menjadi lebih baik dan kemudian aspirasi dan keluhan warga masyarakat sebisa mungkin dijembatani kepada pihak yang terkait, agar pemenuhan keinginan yang dapat

diterima bisa direalisasikan oleh pihak yang berkepentingan didalamnya.

Berdasarkan Teori galtung, upaya resolusi konflik dapat dilakukan dengan tahapan *Peace keeping*, *Peace making* dan *Peace building*. Upaya *Peace keeping* telah dilakukan yaitu dengan menghentikan kekerasan yang dilakukan dalam hal ini penarikan mundur pasukan di lokasi kejadian bentrokan tersebut, kemudian tahapan selanjutnya *Peace making* yaitu dengan menciptakan perdamaian, dengan melakukan upaya cipta kondisi damai yang melibatkan intel kodim dan intel daerah ke Desa Sukamulya tersebut dengan melakukan pendekatan secara persuasif yang dilakukan dan terus dilaporkan perkembangannya dengan berkoordinasi kepada TNI.

Tahapan selanjutnya yaitu *peace building*, yaitu tahapan resolusi konflik yang dilakukan setelah *peace making* dan *peace keeping* telah dilaksanakan, dalam upaya membangun perdamaian dari pemerintah daerah melalui Bapelitbangda berupaya untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat yang berdampak pada pembangunan bandara BIJB Kertajati, dengan mengedepankan sektor

pariwisata yang sedang dikembangkan dan meningkatkan sektor perdagangan dan jasa, agar masyarakat asli Majalengka akan kuat menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Dengan kondisi peningkatan ekonomi yang baik maka kemungkinan terjadinya konflik akan semakin berkurang.

Selain itu pembangunan perdamaian diupayakan oleh pihak PT BIJB sebagai pengelola bandara untuk melakukan berbagai upaya memberikan bantuan CSR yang dibutuhkan oleh masyarakat, BIJB memiliki komitmen untuk memberdayakan warga yang terkena dampak bandara, memberikan kesempatan pada warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut untuk bekerja bersama dengan mitra-mitra yang melakukan kerjasama dengan perusahaan BIJB antara lain yaitu *Freshklindo Cleaning Service*, *GB Parking* (Pengelola Parkir), kebersihan luar bandara, *tenant* dan *main contractor*.

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam upaya resolusi konflik adalah dengan kearifan lokal yang masih diupayakan untuk dilakukan yaitu melestarikan adat istiadat dan budaya yang ada di daerah tersebut. Kearifan

lokal dapat ditunjukkan dengan aktivitas kultural yang menekankan aspek kebersamaan dan filosofi-filosofi yang mendalam. Berbagai kegiatan tahunan yang tetap dijalankan di Desa Sukamulya, Aktifitas tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Desa Sukamulya yaitu dilakukannya acara Suraan, Sedekah Bumi atau di sebut dengan gaur bumi, Munjungan atau ziarah kemakam sesepuh desa, Mapag Sri serta kegiatan keagamaan lainnya seperti Peringatan Nuzulul Qur'an, Isra Miraj dan Maulid Nabi.

Tujuan dari penyelenggaraan ini masyarakat menjadi lebih dapat berkomunikasi dalam kondisi tersebut. adanya interaksi yang baik menjadikan kebersamaan terjalin dengan suasana yang saling percaya dan keterbukaan serta mengurangi kesalah pahaman yang terjadi. Dengan adanya *local wisdom* akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk saling berinteraksi dan selalu menjaga kebersamaan dan keselarasan dalam bermasyarakat, sehingga tercipta kondisi damai yang diharapkan seluruh masyarakat.

Konflik yang ada dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati belum menuju kepada damai yang positif

dan tahapannya masih damai negatif artinya kondisi sudah damai namun masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini masih tetap bertahan dengan keputusannya untuk tetap mempertahankan lahan pertanian dan pemukiman miliknya untuk tidak tergusur karena pembangunan bandara BIJB Kertajati, walaupun jumlahnya sudah minoritas namun hal ini tidak dapat dianggap sepele karena dari kelompok kecil ini tidak menutup kemungkinan konflik akan kembali terjadi jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.

Pembebasan lahan pertanian untuk ini menjadikan pembangunan bandara menjadi terhambat dikarenakan konflik yang terjadi, keamanan nasional menurut Barry Buzzan yang mengkategorikan lingkup isu keamanan kedalam 5 sektor yaitu : Sektor militer, Sektor politik, Sektor ekonomi, Sektor sosial dan Sektor lingkungan. Konflik yang terjadi hal ini berdampak kepada beberapa sektor tersebut, jika konflik dibiarkan terjadi dan bertambah luas maka keamanan nasional tidak akan tercapai yaitu Pembangunan sarana dan prasarana demi kepentingan umum akan

terhambat jika didalamnya terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Untuk itu resolusi konflik dilakukan dengan melibatkan beberapa *stake holder* yang ada dan tetap diciptakan kondisi damai baik dari aparat keamanan maupun pemerintahan di desa tersebut.

Kesimpulan

1. Adanya konflik dalam pembebasan lahan pertanian dilatari oleh beberapa faktor yaitu faktor struktural berupa kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah, Kesepakatan harga dan keinginan warga yang belum dapat direalisasikan, hal ini dirasa oleh warga masyarakat merupakan ketidakadilan yang mereka terima terkait dengan nilai harga tanah yang hanya di putuskan oleh pemerintah. Pemicu bentrokan itu terjadi adalah dengan adanya pengukuran yang dilakukan BPN dengan menyertakan ribuan aparat untuk mengukur lahan warga yang sudah pro namun masyarakat yang kontra berusaha menghalang-halangi jalannya pengukuran yang

dilakukan, Sehingga terjadi bentrok antara aparat keamanan, masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Faktor pendorong mengapa konflik tersebut terjadi yaitu dikarenakan adanya isu rumah hantu yang tidak lagi dibayarkan oleh pemerintah. Adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan membuat faktor pendorong konflik semakin kuat, hal ini dikarenakan timbulnya kekewaan masyarakat terhadap pemerintah menyebabkan konflik menjadi semakin kompleks.

2. Kedua, yaitu tentang resolusi konflik yang dilakukan pasca terjadi bentrokan pada tanggal 17 Nopember 2016, bahwa setelah konflik terjadi, ada upaya mediasi yang dilakukan pihak ketiga yaitu dari Staf khusus kepresidenan yang kedekatan dengan beberapa LSM yang menjembatani pertemuan tersebut, Dari pihak keamanan kodim menugaskan anggotanya melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga masyarakat, dan melakukan upaya komunikasi berupaya penghentian

upaya intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga cipta kondisi damai terus dilakukan. Upaya lain yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah dengan upaya kearifan lokal yang ada di Desa Sukamulya, mempertemukan masyarakat yang pro dan kontra dalam suatu acara yang sakral dan diyakini hal ini menjadi bentuk komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi diantara warga masyarakat. PT BIJB melakukan upaya-upaya berupa bantuan CSR untuk kepentingan masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan bandara. upaya cipta kondisi damai agar warga masyarakat kepentingannya diperhatikan sehingga dalam situasi dan kondisi yang ada tercipta suasana damai dan nyaman dalam kebersamaan.

Saran

1. Konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan menjadikan kelompok masyarakat terbagi dua yaitu pro dan kontra, saat ini masyarakat yang kontra

masih ada walaupun jumlahnya sudah minoritas, namun kondisi di masyarakat ini agar tetap diperhatikan keinginannya dan tetap mendapat perlindungan di tengah-tengah pembangunan Bandara . Agar di beri alternatif lain penggantian selain uang, misalnya relokasi lahan yang difasilitasi oleh pemerintah yang lokasinya tidak akan terdampak pembangunan bandara maupun aerocity

2. Dalam upaya perdamaian yang berkelanjutan menuntut peran aktif *stake holder* yang ada dalam bersama-sama menjaga dan menciptakan kondisi damai, selain itu penguatan struktur ekonomi di Kabupaten Majalengka dilakukan bukan hanya sebagai wacana melainkan sudah merupakan suatu kebijakan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan.
3. Agar pemerintah provinsi segera menyelesaikan pembayaran terhadap lahan warga yang saat ini masih mengalami keterlambatan, agar

warga masyarakat bisa segera pindah dari lokasi saat ini ke tempat relokasi mandiri dan dapat segera membeli lahan kembali dan melanjutkan aktifitas pertaniannya serta aktifitas sehari-harinya dengan aman dan nyaman.

Daftar Pustaka

Buku :

- Buzan, Barry, 1998, *security: A New Framework For Analysis*, Boulder colo: Lynne Reinner Ole Waver, & Jaap de Wilde
- Emzir, M. Pd Prof. Dr. 2010 *Metodologi penelitian kualitatif Analisis data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Folger, J.P., dan Poole, M.S (1984). *Working Through Conflict*. USA: Scoot, Foresman Company
- Galtung, Johan. 1996 *Peace by Peaceful Means peace and conflict development and civilization*, International Peace research Institute, Sage Publication, Ols
- Hugh Miall, Oliver Ramsbotham Tom woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002
- Malik, Ichsan. *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017
- Musleh, Herry, 2012 *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan konflik Agraria*, UIN-Maliki Press,
- Wahyudi, Bambang. *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*, Yogyakarta. September 2018

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*,
Jakarta: Salemba Hunamika, 2009

2007 tentang Rencana Induk
Bandar udara di Kabupaten
Majalengka Propinsi Jawa Barat.

Karya Ilmiah:

Dina Kartika, Hubungan pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Dalam Penyelenggaraan Bandara
(Kajian atas pembangunan
Bandara Kertajati di Jawa
Barat), Tesis, Institut Teknologi
Bandung, 2015

Sri Wahyuni, Strategi Pemerintah
Indonesia dalam penyelesaian
Konflik Klaim Traditional Fishing
Ground pada zona ekonomi
Eksklusif Indonesia di Perairan
Natuna oleh republic Rakyat
Tiongkok, Tesis. Universitas
Pertahanan, Bogor 2018

Sumber lain:

Badan Pusat Statistik Kabupaten
Majalengka, Kabupaten
Majalengka dalam Angka 2018,
Majalengka Regency in Figures
2018

Data pembangunan Kabupaten
Majalengka tahun 2012-2016,
Pemerintah kabupaten
Majalengka melalui website
http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id/images/datapembangunan/DATA%20PEMBANGUNAN%202012-2016_2.pdf

Lembaga Bantuan Hukum, Catatan Akhir
tahun 2016 provinsi Jawa Barat

Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.web.id/konflik>

Konsorsium Pembaharuan Agrariaa
(KPA) yang di unggah situs
<http://www.kpa.or.id/news/blog/warga-sukamulya-menolak-pembangunan-bjib/>

Peraturan Menteri (Permen).
Perhubungan No KM 5 Tahun